

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA PADANG

Oleh:

Umi Indriani¹

Syamsir²

Niken Najmi Zura³

Siti Ayu Silmyani⁴

Rafli Dwi Putra⁵

Muhammad Radja Ramadhani⁶

Yohakim Waukateyau⁷

Universitas Negri Padang

Alamat: JL. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat (25171).

Korespondensi Penulis: andrianiumi12@gmail.com, syamsir@fis.unp.ac.id,
nikennajmizura12@gmail.com, sitiayusilmyani10@gmail.com,
raflidwiputra1@gmail.com, radjapancasati@gmail.com, Yohakim24@gmail.com.

Abstract. *This study aims to describe and analyze the dynamics of social and cultural relations in the process of public policy implementation in the city of Padang, with an emphasis on the role of social values and local cultural norms in influencing the effectiveness of regional government policies. This research employs a qualitative approach with a case study method, in which data collection was carried out through field observations, in-depth interviews with government officials, traditional leaders, and community members, as well as documentation of relevant regulations and policies. The results of the study indicate that the implementation of public policies in Padang is significantly influenced by the social structure and cultural system of the Minangkabau community, particularly in terms of decision-making based on deliberation, the role of traditional leaders, and the values of kinship and collectivism. The misalignment between the substance of policies and the socio-cultural realities of the community leads to*

Received April 25, 2025; Revised May 04, 2025; May 09, 2025

*Corresponding author: andrianiumi12@gmail.com

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA PADANG

resistance to policies and a low level of public participation. Therefore, it is necessary to adopt policy approaches that are adaptive, contextual, and participatory by taking into account the characteristics of local social and cultural values so that policy implementation can be more effective and widely accepted by the public. These findings affirm the importance of integrating administrative and cultural approaches in building local governance that is responsive, inclusive, and sustainable.

Keywords: *Social And Cultural, Public Policy, City Of Padang.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika hubungan sosial dan budaya dalam proses implementasi kebijakan publik di Kota Padang, dengan menekankan pada peran nilai-nilai sosial dan norma budaya lokal dalam memengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, serta dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di Kota Padang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan sistem budaya masyarakat Minangkabau, khususnya dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis musyawarah, peran tokoh adat, serta nilai-nilai kekerabatan dan kolektivitas. Ketidakharmonisan antara substansi kebijakan dengan realitas sosial budaya masyarakat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan dan rendahnya tingkat partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif, kontekstual, dan partisipatif dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya lokal agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan diterima secara luas oleh masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan administratif dengan pendekatan kultural dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sosial Dan Budaya, Kebijakan Publik, Kota Padang.

LATAR BELAKANG

Hubungan sosial dan budaya merupakan bagian integral dalam kehidupan manusia yang saling berkaitan dan membentuk tatanan masyarakat. Hubungan sosial terbentuk melalui interaksi antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan budaya

merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang mengatur serta memberi makna terhadap interaksi tersebut (Maradjabessy et al., 2019). Dalam masyarakat, kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya berfungsi sebagai kerangka yang membentuk perilaku individu maupun kelompok dalam lingkup sosial yang lebih luas (Berutu et al., 2023). Kebijakan publik sebagai produk dari proses administrasi negara tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam ruang sosial yang dinamis. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pada dasarnya merupakan instrumen yang bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi atau isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh konteks sosial dan budaya tempat kebijakan tersebut diimplementasikan (Malik, 2019).

Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan publik. Keberagaman etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat menuntut pemerintah untuk memperhatikan konteks lokal dalam setiap proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengharuskan adanya pendekatan yang tidak bersifat seragam (uniform) melainkan kontekstual, sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Pemerintah perlu memahami bahwa pendekatan yang bersifat sentralistik cenderung mengabaikan dinamika lokal, dan pada akhirnya dapat menimbulkan penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan (Setiawan, 2019).

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang khas, yaitu budaya Minangkabau. Budaya ini memiliki sistem kekerabatan matrilineal dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang terintegrasi dengan ajaran agama Islam. Prinsip hidup masyarakat Padang yang dikenal dengan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" menunjukkan kuatnya keterkaitan antara adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini memberikan pengaruh besar terhadap pola hubungan sosial dan cara masyarakat merespons kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah (Sukmawati, 2019).

Pelaksanaan kebijakan publik di Kota Padang perlu mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Nilai-nilai adat, peran tokoh adat, serta struktur sosial yang khas menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila kebijakan yang diterapkan tidak selaras dengan nilai-nilai tersebut, maka besar kemungkinan akan terjadi penolakan atau hambatan dalam proses implementasinya. Masyarakat Minangkabau memiliki struktur sosial yang

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA PADANG

berbasis pada nagari, di mana tokoh-tokoh seperti ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan sosial. Dalam banyak kasus, keberadaan tokoh adat ini menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal penyampaian informasi maupun pelaksanaan program. Selain struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat Padang juga turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam merespons kebijakan publik. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa hormat terhadap tokoh tua menjadi landasan dalam berbagai bentuk interaksi sosial. Implementasi kebijakan publik yang mengabaikan sistem nilai tersebut dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat atau bahkan munculnya konflik sosial (Mardian et al., 2024).

Dengan memahami dinamika sosial dan budaya secara mendalam, pemerintah Kota Padang dapat merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang responsif, akomodatif, dan berkelanjutan. Proses ini membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sinergi yang mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Sosial dan Budaya

Sosial dan budaya merupakan dua konsep fundamental dalam ilmu sosial yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara konseptual, hubungan sosial merujuk pada interaksi yang terjadi antarindividu maupun antarkelompok dalam suatu komunitas yang saling memengaruhi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Interaksi ini tidak hanya menciptakan jaringan komunikasi antarpersonal, tetapi juga membentuk norma, nilai, dan struktur sosial yang menjadi dasar bagi berlangsungnya keteraturan sosial. Hubungan sosial mencerminkan dinamika kehidupan kolektif yang bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan budaya.

Budaya dapat dipahami sebagai keseluruhan sistem pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, serta produk-produk simbolik lainnya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pembelajaran sosial. Budaya tidak hanya mencakup benda-benda material seperti pakaian, arsitektur, atau makanan tradisional, tetapi juga mencakup unsur non-material seperti bahasa, adat istiadat, sistem kepercayaan, dan pola

pikir masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2009), budaya memiliki tiga wujud utama, yaitu: sistem ide atau gagasan (ideologi), sistem aktivitas atau tindakan (tindakan sosial), dan sistem artefak atau hasil karya manusia (benda kebudayaan). Ketiga unsur tersebut saling berhubungan erat dan membentuk kerangka hidup bersama dalam masyarakat (Alaslan, 2021).

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara umum diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor-aktor pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik yang dihadapi masyarakat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah "*whatever governments choose to do or not to do*", yang berarti bahwa kebijakan mencakup tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak dalam merespons isu-isu tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan publik bukan sekadar produk hukum atau regulasi, tetapi mencerminkan arah strategis pemerintah dalam mengelola kehidupan masyarakat melalui intervensi yang terencana, sistematis, dan terukur. Kebijakan publik memiliki berbagai tahapan yang meliputi perumusan masalah, penyusunan agenda, perumusan alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Proses ini melibatkan banyak aktor, baik dari unsur pemerintah (eksekutif, legislatif, dan birokrasi) maupun dari unsur masyarakat (organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, media, dan individu warga negara) (PRABAWATI et al., 2019).

Dalam kerangka administrasi negara, kebijakan publik menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun demikian, realisasi dari tujuan kebijakan sangat bergantung pada proses implementasinya di lapangan. Tidak jarang kebijakan yang telah disusun dengan baik di tingkat pusat atau daerah mengalami kendala saat diterapkan, terutama jika tidak memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Di Kota Padang, di mana masyarakat memiliki sistem nilai yang kuat dan berakar dalam tradisi, kebijakan publik yang tidak adaptif terhadap budaya lokal dapat menghadapi hambatan serius dalam pelaksanaannya.

Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh George C. Edward III

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edward III merupakan salah satu teori klasik yang hingga kini banyak digunakan dalam studi

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA PADANG

administrasi publik untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut Edward, implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak sederhana, karena melibatkan berbagai elemen yang saling berinteraksi dalam situasi yang kompleks. Edward mengidentifikasi empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Roring et al., 2021).

Variabel pertama, komunikasi, sangat penting dalam memastikan bahwa pesan kebijakan yang telah dirancang oleh pengambil keputusan dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh pelaksana di lapangan maupun oleh masyarakat sebagai target kebijakan. Komunikasi yang efektif mencakup kejelasan isi kebijakan, konsistensi instruksi, serta keterbukaan dalam dialog antara pembuat kebijakan dan aktor pelaksana. Dalam konteks Kota Padang, komunikasi kebijakan harus disesuaikan dengan cara pandang masyarakat lokal, termasuk mempertimbangkan penggunaan bahasa daerah, simbol budaya, serta keterlibatan tokoh adat atau pemuka agama sebagai media penyampaian kebijakan.

Variabel kedua, sumber daya, mencakup ketersediaan tenaga pelaksana yang kompeten, dana yang memadai, peralatan teknis, serta dukungan administratif yang menunjang implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirancang sebaik apapun tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal. Dalam konteks kebijakan daerah, seringkali tantangan muncul karena keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, atau keterbatasan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya yang kontekstual agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Variabel ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana, yang merujuk pada sejauh mana pelaksana kebijakan memiliki pemahaman, komitmen, dan sikap positif terhadap tujuan kebijakan yang diemban. Sikap ini menjadi penting karena keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan mental dan emosional pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Jika pelaksana kebijakan bersikap apatis, tidak memahami substansi kebijakan, atau bahkan menolaknya secara internal, maka proses implementasi akan mengalami deviasi atau bahkan kegagalan. Di daerah seperti Kota Padang, penting

bagi pelaksana kebijakan untuk memiliki sensitivitas budaya agar mereka tidak hanya menjalankan kebijakan secara mekanis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan nilai-nilai lokal.

Variabel keempat, yaitu struktur birokrasi, mencerminkan bagaimana organisasi pemerintah dirancang untuk mengatur dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku, hirarkis, dan tidak responsif terhadap kondisi lapangan akan menghambat fleksibilitas dan inovasi dalam pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, birokrasi yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik dapat mempercepat pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks Kota Padang, integrasi antara struktur formal birokrasi dengan struktur informal masyarakat adat dapat menjadi kekuatan tersendiri jika dikelola secara kolaboratif.

Melalui keempat variabel ini, Edward menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi sangat tergantung pada interaksi antaraktor, konteks lokal, serta proses dinamis yang terjadi selama pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam mengkaji hubungan sosial dan budaya terhadap implementasi kebijakan publik di Kota Padang, teori ini memberikan kerangka analisis yang kuat dan sistematis untuk memahami berbagai tantangan sekaligus peluang yang muncul di lapangan (LAARY et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika hubungan sosial dan budaya dalam implementasi kebijakan publik di Kota Padang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, perspektif, dan pengalaman subjektif para informan yang terlibat dalam proses kebijakan secara utuh dalam konteks sosial dan budaya setempat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi, melainkan berfokus pada pengungkapan realitas sosial yang kompleks melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap berbagai informan kunci yang terdiri atas aparat pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga Kota Padang yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan publik

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA PADANG

tertentu. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan informan terhadap topik yang diteliti. Teknik observasi partisipatif digunakan untuk menangkap dinamika sosial dan budaya yang terjadi di lapangan, baik dalam kegiatan formal seperti forum musyawarah kebijakan, maupun dalam aktivitas sosial sehari-hari masyarakat. Sementara itu, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, arsip berita, dan catatan masyarakat dijadikan bahan dokumentasi yang membantu memperkuat dan melengkapi data primer dari wawancara dan observasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan pola-pola tematik yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Peneliti melakukan proses reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, dan penarikan makna yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Kota Padang. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan *member check* kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dilakukan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses kompleks yang tidak hanya mencakup aspek formal dan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks Kota Padang yang merupakan bagian dari wilayah budaya Minangkabau, kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem nilai, struktur sosial, dan simbol budaya lokal yang memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dicanangkan pemerintah daerah Kota Padang sering kali menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaannya, terutama apabila tidak selaras dengan norma-norma sosial dan kultural masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan yang terdiri atas aparatur pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga Kota Padang, ditemukan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pola interaksi sosial dan pengambilan keputusan kolektif. Dalam sistem tersebut, peran para ninik mamak (pemuka adat laki-

laki) memiliki posisi sentral dalam menengahi, mengarahkan, dan mewakili kepentingan keluarga besar dalam berbagai urusan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ketika sebuah kebijakan yang menyangkut ruang hidup atau hak sosial masyarakat dijalankan tanpa melalui konsultasi dan pelibatan pihak-pihak adat, kebijakan tersebut cenderung menimbulkan penolakan. Masyarakat merasa kehilangan ruang negosiasi dan interpretasi terhadap kebijakan yang mereka anggap datang dari luar sistem nilai yang mereka yakini.

Contoh nyata dari dinamika tersebut dapat ditemukan pada program relokasi kawasan pemukiman kumuh yang dirancang oleh Pemerintah Kota Padang. Meskipun secara teknis kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, namun di mata sebagian besar masyarakat yang terdampak, relokasi tersebut dipandang sebagai bentuk pemaksaan yang mengancam tatanan sosial-budaya yang telah lama terbentuk. Berdasarkan observasi langsung dan hasil dokumentasi, ditemukan bahwa keluarga-keluarga yang tinggal dalam satu kawasan permukiman memiliki relasi sosial yang erat sebagai bagian dari satu kaum atau suku, yang memiliki keterikatan terhadap rumah gadang dan tanah ulayat. Pindahan secara administratif tanpa mempertimbangkan aspek sosial tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap eksistensi budaya lokal yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Minang.

Penolakan terhadap kebijakan relokasi bukan semata-mata disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk berubah, melainkan lebih kepada ketidaksesuaian pendekatan kebijakan dengan mekanisme komunikasi dan partisipasi yang menjadi bagian dari budaya lokal. Nilai musyawarah dan mufakat yang melekat dalam masyarakat Minangkabau merupakan prinsip utama dalam pengambilan keputusan kolektif. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah sering kali hanya memberikan informasi melalui surat pemberitahuan dan pertemuan terbatas, tanpa membuka ruang diskusi yang setara dengan para pemangku kepentingan lokal. Ketidakhadiran tokoh-tokoh adat dalam forum-forum kebijakan menyebabkan kurangnya legitimasi terhadap kebijakan tersebut. Kondisi ini memunculkan persepsi negatif terhadap pemerintah dan bahkan menciptakan ketegangan antarwarga dan aparat yang seharusnya menjadi mitra pembangunan.

Selain kasus relokasi, bentuk lain dari dinamika hubungan sosial dan budaya dalam kebijakan publik dapat dilihat dalam implementasi program pengelolaan

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA PADANG

lingkungan berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Padang telah menjalankan beberapa program pelestarian lingkungan seperti bank sampah dan pengurangan sampah rumah tangga. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjalin kemitraan sosial dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki otoritas informal seperti kelompok majelis taklim, pemuda adat, dan komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika program dijalankan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tingkat partisipasi menjadi lebih tinggi dan masyarakat lebih memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan. Sebaliknya, program yang diluncurkan tanpa pendekatan kultural hanya menghasilkan hasil yang bersifat sementara atau bahkan gagal dilaksanakan.

Keterlibatan elemen masyarakat lokal dalam perumusan hingga pelaksanaan kebijakan publik merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Pelibatan ini bukan hanya dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan formal, melainkan untuk menciptakan proses negosiasi sosial yang seimbang antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dari kebijakan. Dalam wawancara dengan tokoh adat, disampaikan bahwa banyak kebijakan yang seharusnya dapat diterima dengan baik apabila pemerintah terlebih dahulu mengadakan dialog yang terbuka dan menghargai struktur sosial yang berlaku. Misalnya, penyusunan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat ketika tokoh agama dan pemuka adat dilibatkan dalam merumuskan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyampaian kebijakan. Pemerintah cenderung menggunakan pendekatan *top-down* yang bersifat informatif satu arah, tanpa membuka ruang untuk respons dan masukan dari masyarakat. Padahal dalam konteks masyarakat Kota Padang, proses penerimaan kebijakan sangat erat kaitannya dengan aspek emosional, simbolik, dan kolektif. Kebijakan yang hadir secara tiba-tiba dan tidak menyentuh nilai-nilai lokal akan menimbulkan resistensi, bahkan dalam bentuk tindakan pasif seperti pengabaian atau tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. Sementara kebijakan yang melalui proses musyawarah dan disampaikan dalam format yang dekat dengan budaya lokal seperti dalam bentuk pidato adat atau pengajian, lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

Dengan mempertimbangkan hasil temuan di lapangan, dapat dipahami bahwa proses implementasi kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya tempat kebijakan itu dijalankan. Kota Padang sebagai kota yang kaya akan nilai-nilai adat Minangkabau, menuntut adanya pendekatan kebijakan yang bersifat partisipatif, komunikatif, dan kultural. Pemerintah tidak hanya bertugas merumuskan dan mengeksekusi kebijakan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam membangun dialog antara berbagai kepentingan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami sistem nilai yang dianut masyarakat, menjalin hubungan yang setara dengan tokoh-tokoh lokal, serta membuka ruang kolaborasi dalam setiap tahapan kebijakan.

Dengan kata lain, dinamika hubungan sosial dan budaya dalam implementasi kebijakan publik di Kota Padang menggambarkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun model kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal. Kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai budaya dan struktur sosial tradisional bukan merupakan bentuk romantisme terhadap masa lalu, melainkan strategi praktis untuk memastikan keberhasilan kebijakan di tingkat akar rumput. Pemerintah Kota Padang perlu membangun struktur komunikasi kebijakan yang tidak hanya berbasis data dan regulasi, tetapi juga menghormati dan melibatkan kekuatan sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika hubungan sosial dan budaya dalam implementasi kebijakan publik di Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kejelasan regulasi atau ketepatan administratif, melainkan sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu berinteraksi secara konstruktif dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Minangkabau yang menganut sistem adat dan norma-norma kultural yang kuat, pendekatan kebijakan yang bersifat *top-down* dan tidak memperhatikan struktur sosial serta kearifan lokal akan berpotensi besar menghadapi resistensi, baik secara pasif maupun aktif. Implementasi kebijakan publik di Kota Padang harus memperhitungkan adanya peran sentral tokoh

DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA PADANG

adat, pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta pola relasi sosial yang menjunjung tinggi kebersamaan dan rasa saling menghormati. Ketidakharmonisan antara struktur kebijakan formal dan dinamika sosial budaya masyarakat akan menyebabkan kebijakan menjadi sulit diterima dan tidak efektif dalam jangka panjang.

Saran

Merujuk pada hasil temuan dan kesimpulan penelitian, maka disarankan agar Pemerintah Kota Padang mengembangkan model implementasi kebijakan publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis pada pendekatan kultural lokal. Pemerintah perlu melibatkan secara aktif tokoh adat, tokoh agama, serta pemuka masyarakat dalam setiap tahap proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, guna menciptakan ruang dialog yang setara antara struktur formal dan struktur sosial masyarakat. Proses sosialisasi kebijakan harus dikemas dalam format komunikasi yang sesuai dengan nilai dan simbol budaya Minangkabau, seperti melalui musyawarah adat, kegiatan sosial keagamaan, atau forum komunitas lokal yang bersifat informal namun efektif dalam menyampaikan pesan kebijakan. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai lokal juga perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif.

DAFTAR REFERENSI

- Alaslan, A. (2021). *FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK : Studi Relokasi Pasar*. CV. Pena Persada.
- Berutu, S. R., Purba, T. P. B., & Sahlan. (2023). *Sistem Budaya Dan Sistem Sosial*. 1(1).
- LAARY, Y., TULUSAN, F. M. G., & DENGGO, S. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT*. VIII(120), 60–68.
- Malik, R. (2019). *Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga NKRI*.
- Maradjabessy, M. F., Lasut, J. J., & Lumintang, J. (2019). *INTERAKSI SOSIAL FORUM MAHASISWA KOTA TIDORE KEPULAUAN DI KOTA MANADO*. 12(1).

- Mardian, S., Syamsir, Vanessa, E. R., Putri, U. S., Gading, & Nufus, N. (2024). *PERAN BUDAYA DALAM MEMBENTUK NORMA DAN NILAI SOSIAL : SEBUAH TINJAUAN TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL DAN BUDAYA*. 3(11).
- PRABAWATI, I., RAHAJU, T., & KURNIAWAN, B. (2019). *Analisis kebijakan publik*.
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Setiawan, A. (2019). *SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL DALAM ADAT MINANGKABAU PADA NOVEL SITI NURBAYA: KASIH TAK SAMPAI KARYA MARAH RUSLI*. 2(April).
- Sukmawati, E. (2019). *Filosofi sistem kekerabatan matrilineal sebagai perlindungan sosial keluarga pada masyarakat minangkabau*. 8(1), 12–26.
<https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>